



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Karawang, 25 Agustus 1991, umur 29 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK : XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam., sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Padang, 16 Juni 1994, umur 26 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK : XXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Batam., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 19 Oktober 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2011 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Kepulauan Riau, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : XXX/51/I/2011, tertanggal 19 Januari 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

3.1 ANAK, Tempat tanggal lahir Batam, Umur 9 Tahun;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan Tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi perselesihan dan pertengkaran yang terus menerus. Adapun penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon ternyata memiliki laki-laki lain yang namanya tidak diketahui oleh Pemohon, saat itu Pemohon melihat sms dari seorang laki-laki dengan panggilan "sayang" tetapi setelah di tanya kepada Termohon, Termohon tidak mengakuinya tetapi beranggapan lain karena saat Pemohon menelpon laki-laki tersebut membuat pengakuan yang berubah-ubah makanya timbul kecurigaan oleh Pemohon tetapi Pemohon mencoba bersabar untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa semenjak kejadian diatas hubungan Pemohon dan Termohon berubah dan Termohon lebih banyak diam dan tidak mau melayani Pemohon seperti seorang suami;
 - c. Bahwa puncaknya pada akhir bulan Januari Tahun 2015 Termohon dan Pemohon sepakat untuk berpisah dan kembali kerumah kediaman orang tua masing-masing , dan setelah kejadian pisah rumah itu, Keluarga Termohon meminta Pemohon untuk dibuatkan surat pernyataan cerai yang dibubuhi matrai 6000 bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan saling ganggu lagi, semenjak kejadian itu

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini ;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah dengan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, dan sepakat untuk bercerai;
6. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan amar putusanya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam, dengan Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX, atas nama PEMOHON, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 28 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 051/51/I/2011, tanggal 19 Januari 2011, atas nama PEMOHON dengan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada bulan januari 2011 yang lalu di Kota Batam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi. Menurut Termohon, nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa sebab lain pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik, ia tidak mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon dan tidak mengurus rumah tangganya dengan baik;
 - Bahwa saksi tidak tahu hal tersebut;
 - Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali untuk membina rumah tangga bersama Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersabar dan rukun dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;;
2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya TERMOHON;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri namun saksi tidak tahu tentang pernikahan mereka karena saat kenal Pemohon dengan Termohon telah menjadi suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar dan saat bertengkar Termohon pernah menemui saksi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi. Nafkah yang diberikan Pemohon menurut Termohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015. Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya, dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batam berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Kota Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2008, tanggal 03 Januari 2008, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya memberikan nasehat agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Termohon sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Peraturan Mahkamah agung RI No.1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini berdasarkan permohonan Pemohon di persidangan Pemohon bermohon agar diberi izin untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangganya sejak 2014 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ternyata memiliki laki-laki lain yang namanya tidak diketahui oleh Pemohon, saat itu Pemohon melihat sms dari seorang laki-laki dengan panggilan "sayang" tetapi setelah di tanya kepada Termohon, Termohon tidak mengakuinya tetapi beranggapan lain karena saat Pemohon menelpon laki-laki tersebut membuat pengakuan yang berubah-ubah makanya timbul kecurigaan oleh Pemohon tetapi Pemohon mencoba bersabar untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, semenjak kejadian diatas hubungan Pemohon dan Termohon berubah dan Termohon lebih banyak diam dan tidak mau melayani Pemohon seperti seorang suami, puncaknya pada akhir bulan Januari Tahun 2015 Termohon dan Pemohon sepakat untuk berpisah dan kembali kerumah

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



kediaman orang tua masing-masing, dan setelah kejadian pisah rumah itu, Keluarga Termohon meminta Pemohon untuk dibuatkan surat pernyataan cerai yang dibubuhi matrai 6000 bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan saling ganggu lagi, semenjak kejadian itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, meskipun telah dipanggil untuk hadir dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon adalah berdomisili di Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama **SAKSI I dan SAKSI II**, serta kenal dengan Termohon, telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



memberikan keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena ekonomi. menurut Termohon, nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup. Selain itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik. Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, Keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, sesuai dengan pasal 172,175 R.Bg, maka keberadaannya sebagai saksi secara formil dapat diterima dan keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung keterangan Pemohon, dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka secara materiil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang membenarkan dalil-dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, ditandai dengan adanya pertengkarannya, karena masalah Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak **4 (empat) tahun lamanya**, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung bukti tertulis dan dengan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-kejadian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Januari 2011, di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah **4 (empat) tahun yang lalu**;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah **sudah 4 (empat) tahun**, dan selama berpisah tidak saling perduli lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, Pemohon dan Termohon berpisah rumah **sudah 4 (empat) tahun**, dan sejak itu sudah tidak saling peduli lagi. Pemohon tetap pada permohonannya

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



untuk menceraikan Termohon, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa keadaan demikian dapat dilihat dari fakta di persidangan, dimana upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, maupun oleh pihak keluarga sebelum persidangan tidak membawa hasil, Hal ini merupakan indikasi bahwa Pemohon sudah tidak cinta dan tidak sayang lagi, serta tidak mau lagi kembali kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), (vide Psl.1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Psl 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Artinya : Dan Jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami, Dra Erina., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Yusnimar., M.H, Drs. H. Azizon, SH, MH., selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, di dampingi Hesti Syarifaini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar., M.H.

Dra. Erina., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Azizon, SH, MH.,

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses = Rp 50.000,00,-
3. Panggilan = Rp 270.000,00,-
4. P N B P = Rp 20.000,00,-
5. Redaksi = Rp 10.000,00,-
6. Meterai = Rp 6.000,00,-
- J u m l a h = Rp 386.000,00,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.